

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**TRIWULAN I
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BAB I KUESIONER SURVEI	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Dan Sasaran.....	2
C. Kuesioner Survei	2
BAB II METODOLOGI SURVEI	6
A. Kriteria Responden	6
B. Metode Pencacahan.....	8
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	10
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	13
A. Analisis Hasil Survei	13
B. Tindak Lanjut 3 (tiga) Unsur Terendah Hasil Survei	20
BAB IV DATA SURVEI	21
A. Hasil Survei Dari Aplikasi SISUPER	22
B. Publikasi Hasil Survei	22
C. Data Responden.....	23
BAB V PENUTUP	29
A. Kesimpulan.....	29
B. Rekomendasi.....	29
LAMPIRAN	30

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Berdasarkan Permen PAN & RB 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah

Jakarta, 10 April 2023

Ketua Tim Survei

Mengetahui
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta



SITI FARIDA, S.H.,M.H



Dr. H. Soedarmadji, S.H.,M.Hum.

BAB I

KUESIONER SURVEI

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementrian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Sebagai salah satu syarat untuk tercapainya akreditasi penjaminan mutu sebagai pengadilan yang berkualitas (ICPE) yaitu dengan mengadakan Prespsi Anti Korupsi sebagai pedomannya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tanggal 8 Juli 2021 memberlakukan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya dan Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 Mei 2021. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di Lingkungannya .

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggaraan pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan Dan Sasaran

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Kuesioner Survei

Dalam pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada pengguna layanan, kuesioner yang disusun mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN-RB. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | Tidak Sesuai Prosedur |
| | Jarang Sesuai Prosedur |
| | Sering Sesuai Prosedur |

	Selalu Sesuai Prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta Imbalan tertentu ?	Petugas melayani selalu meminta imbalan
	Petugas melayani sering meminta imbalan
	Petugas melayani jarang meminta imbalan
	Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	Selalu
	Sering
	Jarang
	Tidak Ada
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	Tidak Pernah
	Jarang
	Sering
	Selalu

<p>5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?</p>	<p>Tidak Pernah</p> <p>Jarang</p> <p>Sering</p> <p>Selalu</p>
<p>6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?</p>	<p>Selalu</p> <p>Sering</p> <p>Jarang</p> <p>Tidak Ada</p>
<p>7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)</p>	<p>Tidak Pernah</p> <p>Jarang</p> <p>Sering</p> <p>Selalu</p>
<p>8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?</p>	<p>Selalu</p> <p>Sering</p> <p>Jarang</p>

	Tidak Ada
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	Selalu
	Sering
	Jarang
	Tidak Ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	Selalu
	Sering
	Jarang
	Tidak Ada

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan terhadap responden/masyarakat yang mendapatkan manfaat layanan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, baik yang datang ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maupun secara online dengan menggunakan aplikasi SI SUPER, yang dapat diakses pada website Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta memiliki Kriteria Pendidikan Minimal SLTA dan Kriteria Pekerjaan sebagai Berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Advokat
3. Wiraswasta
4. Pegawai Swasta
5. TNI/POLRI
6. Pelajar/Mahasiswa

Para responden yang telah mengisi Survei Persepsi Anti Korupsi melalui aplikasi siSuper pada link <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/> dapat dipetakan dengan karakteristik sebagai berikut:

A.1. Tingkat pendidikan responden

Menurut tabel profil responden tersebut dibawah ini pendidikan terakhir, mayoritas adalah S1 sejumlah 74 orang atau 87% dari total responden. Sementara responden dengan pendidikan terakhir Diploma menduduki urutan terkecil yaitu sejumlah 1 orang atau 1,2% dari total responden.

Tabel 1
Tingkat pendidikan responden

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	SLTA/SMK	5	5,9	5.9
	Diploma	1	1.2	1.2
	S1	74	87.0	87.0
	S2/S3	5	5.9	100
	Total	85	100	100
Total		85	100	

A.2. Pekerjaan responden

Berdasarkan tabel profil pekerjaan responden tersebut dibawah ini, mayoritas adalah para Pengacara/Advokat sejumlah 49 orang atau 57,6% dari total responden. Sementara responden yang berasal dari TNI/POLRI menduduki urutan terkecil yaitu sejumlah 1 orang atau 1,2% dari total responden.

Tabel 2
Jenis pekerjaan responden

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	PNS	5	5.9	5.9
	Pegawai Swasta	17	20.0	20.0
	Wirausaha	8	9.4	9.4
	TNI/POLRI	1	1.2	1.2
	Pelajar/mahasiswa	5	5.9	5.9
	Advokat/Pengacara	49	57.6	100
	Total			100
Total			100	

A.3. Kelompok Jenis Kelamin

Menurut tabel profil responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel dibawah ini, mayoritas responden adalah laki-laki sejumlah 66 orang atau 77,7% dari total responden. Sementara responden berjenis kelamin perempuan menduduki

urutan terendah yaitu sejumlah 19 orang atau 22,3% dari total responden.

Tabel 3
Jenis Kelamin responden

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	laki-laki	66	77,7	77,7
	Perempuan	19	22,3	22,3
	Total	85	100	100
Total		85	100	

B. Metode Pencacahan

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B.1. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam survei ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

B.2. Lokasi Survei Dan Unit Analisis

Lokasi survei adalah tempat dimana petugas melakukan survei terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data survei yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

B.3. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam survei ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka dan berupa pilihan ganda (*multiple choice*) melalui Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) dengan menu pengisian data responden, pengisian layanan yang dibutuhkan responden, pengisian kuesioner serta pengisian saran dan masukan sebagaimana terlampir (Lampiran I).

Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Analisis data untuk menentukan *indeks Persepsi Anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

C.1. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1

Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 4

Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 5
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

A.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,894. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat bersih dari manipulasi peraturan semakin besar indeks yang didapat mengindikasikan bahwa pelayanan sesuai dengan prosedur dan mudah.

Tabel 6

Niali Indeks Pada Indikator : Manipulasi Peraturan

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Tidak sesuai prosedur	1	0	0
2.	Jarang sesuai prosedur	2	0	0
3.	Sering sesuai prosedur	3	9	27
4.	Selalu Sesuai prosedur	4	76	304
			85	331
Indeks				3,894

A.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,918. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari penyalahgunaan jabatan. Semakin besar nilai indeksnya maka mengindikasikan bahwa semakin bersih pula Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam melakukan penyalahgunaan jabatan.

Tabel 7
Nilai Indeks Pada Indikator: Penyalahgunaan Jabatan

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Petugas melayani meminta imbalan	1	0	0
2.	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0
3.	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	7	21
4.	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	78	312
			85	333
Indeks				3,918

A.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,847. Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari menjual pengaruh.

Tabel 8
Nilai Indeks Pada Indikator: Menjual Pengaruh

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Selalu dihubungi	1	0	0
2.	Sering dihubungi	2	0	0
3.	Jarang/pernah dihubungi	3	13	39
4.	Tidak pernah dihubungi	4	72	288
			85	327
Indeks				3,847

A.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,918. Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah transparan dalam menginfokan biaya yang ada.

Tabel 9
Nilai Indeks Pada Indikator: Transparansi Biaya

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Tidak mudah	1	0	0
2.	Jarang mudah	2	0	0
3.	Sering mudah	3	7	21
4.	Selalu mudah	4	78	312
			85	333
Indeks				3,918

A.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,894. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari adanya transaksi rahasia.

Tabel 10
Nilai Indeks Pada Indikator: Transaksi Rahasia

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	9	27
4.	Tidak Pernah	4	76	304
			85	331
Indeks				3,894

A.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,953, sehingga dapat dijelaskan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah sesuai dan tidak melakukan penambahan biaya terhadap layanan apapun di luar tarif yang sudah ditetapkan .

Tabel 11
Nilai Indeks Pada Indikator : Tambahan Biaya

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	4	12
4.	Tidak Pernah	4	81	324
			85	336
Indeks				3,953

A.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,941, sehingga dapat diartikan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari adanya aktivitas pemberian hadiah.

Tabel 12
Nilai Indeks Pada Indikator: Hadiah

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	5	15
4.	Tidak Pernah	4	80	320
			85	335
Indeks				3,941

A.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 3,965, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pembayaran di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah transparan.

Tabel 13
Nilai Indeks Pada Indikator: Transparansi Pembayaran

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	3	9
4.	Tidak Pernah	4	82	328
			85	337
Indeks				9,965

A.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,918 sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari tindakan percaloan.

Tabel 14
Nilai Indeks Pada Indikator: Percaloan

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Tidak Pernah	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	7	21
4.	Selalu	4	78	312
			85	333
Indeks				3,918

A.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,965 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari perbuatan curang.

Tabel 15
Nilai Indeks Pada Indikator : Perbuatan Curang

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Tidak Pernah	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	3	9
4.	Selalu	4	82	328
			85	337
Indeks				3,965

Tabel 16
Indeks Persepsi AniKorupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,894
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3,918
Q 3	Menjual Pengaruh	3,847
Q 4	Transparansi Biaya	3,918
Q 5	Transaksi Rahasia	3,894
Q 6	Biaya Tambahan	3,953
Q 7	Hadiah	3,941
Q 8	Tranparansi Pembayaran	3,965
Q 9	Percaloan	3,918
Q 10	Perbuatan Curang	3,965
NNR Per RL		39,212

Dari 10 indeks indikator di atas, maka diperoleh hasil **Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebesar 39,212**. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi anti korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah bersih dari korupsi.

Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00.

Tabel 17
Mutu Pelayanan

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA PERADILAN UMUM TRIWULAN I TAHUN 2023	
NILAI IPK	RESPONDEN
<h1>4,00</h1>	<p>JUMLAH : 85</p> <p>JENIS KELAMIN : L = 66 / P = 19</p> <p>PENDIDIKAN : SD = 0</p> <p style="padding-left: 40px;">SMP = 0</p> <p style="padding-left: 40px;">SMA = 5</p> <p style="padding-left: 40px;">DIPLOMA = 1</p> <p style="padding-left: 40px;">S1 = 74</p> <p style="padding-left: 40px;">S2 = 5</p>
NILAI INTERVAL KONVERSI	Periode survei = 01 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023
<h1>99,90</h1>	
<p>TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT</p>	

Tabel 18

Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 –100.00	4	Bersih dari korupsi

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkit masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
1	Tetap mempertahankan apa yang sudah diberikan dengan baik
2	Sangat baik harus dipertahankan
3	Agar di tingkatkan pelayanan yang ada
4	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada

B. Tindak Lanjut 3 (tiga) Unsur Terendah Hasil Survei

Pelaksanaan hasil survei yang dilakukan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada triwulan I tahun 2023 berada pada kategori “**BERSIH DARI KORUPSI**”. Semua unsur penilaian telah diapresiasi secara baik oleh masyarakat, berdasarkan urutan besarnya Survei Persepsi Anti Korupsi, didapatkan 3 unsur yang mendapatkan nilai terendah, yaitu:

1. Menjual pengaruh;
2. Manipulasi Peraturan;
3. Transaksi Rahasia;

Dalam menindaklanjuti 3 (tiga) unsur terendah tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjual pengaruh

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyediakan whatsapp khusus informasi dan whatsapp khusus pengaduan untuk menghindari kontak langsung antara pejabat/karyawan dengan pengguna layanan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah melaksanakan Pemutaran Audio Anti Gratifikasi pada Area Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengingatkan pentingnya menjaga integritas.

2. Manipulasi Peraturan

segala bentuk pelayanan yang ada disesuaikan dengan SOP yang ada, dan sebagaimana yang telah disampaikan disetiap briefing pagi untuk petugas PTSP dari Pengawas maupun Penanggung jawab selalu memberikan arahan bahwa pelayanan harus sesuai dengan SOP dan Peraturan yang berlaku adapun pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki WA khusus Informasi maupun WA khusus Pengaduan yang Bertujuan untuk memudahkan para Pencari Keadalian dalam menanyakan informasi maupun menyampaikan sebuah Laporan.

3. Transaksi Rahasia

mengacu pada *Surat Keputusan* Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-. 144/KMA/SK/1/2011 pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menginformasikan terkait biaya sesuai dengan jenis pelayanan dan melarang setiap pemberian baik berupa barang maupun uang diluar dari pada persyaratan jenis layanan.

BAB IV

DATA SURVEI

A. Hasil Survei Dari Aplikasi SISUPER

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada triwulan I tahun 2023 berhasil meraih kategori “**BERSIH DARI KORUPSI**” dengan nilai indeks sebesar **3,92** berdasarkan nilai indeks Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh dari perhitungan dan analisis data survei serta perhitungan yang didapatkan dari aplikasi SISUPER.



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023

**SURVEY PERSEPSI ANTI
 KORUPSI**
NILAI INDEKS
3,92 / 98,03%

Jumlah	85 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 86	PEREMPUAN : 19
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 0
	SD : 0	Diploma 3 : 1
	SMP : 0	S1 : 74
	SMU : 5	S2 : 5
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 5	SWASTA : 17
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 8
	POLRI : 1	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 54	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	3,847
2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,894
3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3,894

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Dalam menindaklanjuti 3 (tiga) unsur terendah tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjual pengaruh

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyediakan whatsapp khusus informasi dan whatsapp khusus pengaduan untuk menghindari kontak langsung antara pejabat/karyawan dengan pengguna layanan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah melaksanakan Pemutaran Audio Anti Gratifikasi pada Area Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengingatkan pentingnya menjaga integritas.

2. Manipulasi Peraturan

segala bentuk pelayanan yang ada disesuaikan dengan SOP yang ada, dan sebagaimana yang telah disampaikan disetiap briefing pagi untuk petugas PTSP dari Pengawas maupun Penanggung jawab selalu memberikan arahan bahwa pelayanan harus sesuai dengan SOP dan Peraturan yang berlaku adapun pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki WA khusus Informasi maupun WA khusus Pengaduan yang Bertujuan untuk memudahkan para Pencari Keadalian dalam menanyakan informasi maupun menyampaikan sebuah Laporan.

3. Transaksi Rahasia

mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/1/2011 pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menginformasikan terkait biaya sesuai dengan jenis pelayanan dan melarang setiap pemberian baik berupa barang maupun uang diluar dari pada persyaratan jenis layanan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

10 April 2023
 Ketua Pengadilan Tinggi

B. Publikasi Hasil Survei

Triwulan I tahun 2023 oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dilakukan melalui pemasangan poster pada ruang tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan infografis pada media sosial Pengadilan DKI

Jakarta serta pada website PT DKI Jakarta di alamat <https://pt-jakarta.go.id/publik/laporan-publik/laporan-spak/3840-laporan-spak-triwulan-i-tahun-2023.html>

C. Data Responden

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada triwulan I tahun 2023 diikuti oleh 85 responden yang seluruhnya merupakan pengguna layanan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Adapun data dari para responden SPAK di triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DATA RESPONDEN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN I TAHUN 2023

No.	Nama/Kode Responden	Pelayanan	Waktu Rekam	Nomor Handphone
1	DESI	Layanan Perdata	Jumat, 31 Maret 2023 08:25:21 WIB	081289953748
2	Ricky	Layanan Perdata	Jumat, 31 Maret 2023 08:07:12 WIB	081217111708
3	Stephanie	Layanan Perdata	Jumat, 31 Maret 2023 08:05:09 WIB	081398083704
4	Ahmad Rais Setiawan	Layanan Pidana	Selasa, 21 Maret 2023 14:48:18 WIB	08114630416
5	Matheis Yohanes Talakua	Layanan Perdata	Selasa, 21 Maret 2023 13:04:38 WIB	081212481313
6	Hariyadi	Layanan Perdata	Selasa, 21 Maret 2023 13:01:41 WIB	081211096337
7	Lathifah Ramadhani	Layanan Administrasi Umum	Selasa, 21 Maret 2023 12:58:26 WIB	08812887629
8	Elvan. Gones	Layanan Perdata	Selasa, 21 Maret 2023 08:31:45 WIB	082112892699
9	Fauzi	Layanan Administrasi Umum	Selasa, 21 Maret 2023 08:16:56 WIB	083339874226
10	Hermawan Santoso Gunawan	Layanan Perdata	Selasa, 21 Maret 2023 08:14:13 WIB	081345900039
11	Dwi Reny Windy Astuti	Layanan Hukum / Informasi	Senin, 20 Maret 2023 16:03:11 WIB	081382609247
12	Muhammad Taufik Hidayat	Layanan Hukum / Informasi	Senin, 20 Maret 2023 16:00:58 WIB	081289630104
13	FUBIJANTO LIMAN BRATADJAJA	Layanan Perdata	Senin, 20 Maret 2023 15:57:41 WIB	081282198839
14	Amrul	Layanan Perdata	Senin, 20 Maret 2023 14:01:43 WIB	082297195420
15	Amrul	Layanan Perdata	Senin, 20 Maret 2023 10:29:09 WIB	082297195420
16	Suharno	Layanan Hukum / Informasi	Jumat, 17 Maret 2023 13:39:03 WIB	085883400518
17	Syifa	Layanan Administrasi Umum	Jumat, 17 Maret 2023 13:37:04 WIB	087878965939
18	Adolf Roberto Sinaga	Layanan Hukum / Informasi	Kamis, 16 Maret 2023 11:37:14 WIB	085261481155
19	Muhammad Eko	Layanan Perdata	Kamis, 16 Maret 2023 11:33:50 WIB	082299456651
20	Andreas Michael	Layanan Pidana	Kamis, 16 Maret 2023 11:31:55 WIB	082210836994
21	Andi Baroar Nasution	Layanan Perdata	Kamis, 16 Maret 2023 09:49:31 WIB	08119518881

22	Melisa Soediono	Layanan Perdata	Kamis, 16 Maret 2023 09:47:19 WIB	0823136222224
23	Sitorus	Layanan Administrasi Umum	Rabu, 15 Maret 2023 08:54:30 WIB	08115147111
24	Andy	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 15 Maret 2023 08:38:02 WIB	08567858737
25	Linda SH	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 15 Maret 2023 08:34:24 WIB	0811186751
26	Amir	Layanan Perdata	Rabu, 15 Maret 2023 08:32:35 WIB	0817115637
27	Budiman Barimbing	Layanan Perdata	Rabu, 15 Maret 2023 08:24:54 WIB	081314875645
28	Julinar Bhayangkari	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 15 Maret 2023 08:12:42 WIB	082113921776
29	Septian Sugestyo	Layanan Administrasi Umum	Rabu, 15 Maret 2023 08:09:55 WIB	085780109876
30	Arifin Rusli Hutagaol Shmh	Layanan Perdata	Senin, 13 Maret 2023 15:56:31 WIB	081210024013
31	Jumedi	Layanan Hukum / Informasi	Senin, 13 Maret 2023 15:49:54 WIB	083871245806
32	Indra	Layanan Perdata	Senin, 13 Maret 2023 11:35:47 WIB	0812125788971
33	Yeve Limbong	Layanan Perdata	Senin, 13 Maret 2023 11:33:53 WIB	081315401417
34	Torus Hasudnga	Layanan Tipikor	Senin, 13 Maret 2023 11:31:40 WIB	081314137308
35	Martha N Janggo	Layanan Perdata	Senin, 13 Maret 2023 09:57:53 WIB	08129893451
36	Owen Samuel	Layanan Perdata	Kamis, 9 Maret 2023 11:28:06 WIB	081398112496
37	Dody N Mardiyansyah	Layanan Perdata	Kamis, 9 Maret 2023 10:04:49 WIB	08117898234
38	Billy J Simamora	Layanan Hukum / Informasi	Selasa, 7 Maret 2023 13:12:06 WIB	081514666131
39	BAYU A LUKMAN, S.H	Layanan Hukum / Informasi	Senin, 6 Maret 2023 10:36:45 WIB	081319419496
40	Yufiter Mino PGP. Sitepu, S.H.,M.H	Layanan Hukum / Informasi	Kamis, 23 Februari 2023 09:21:00 WIB	08152121519
41	Evi	Layanan Perdata	Kamis, 23 Februari 2023 09:19:09 WIB	087878740615
42	Cucu Rahmawaty	Layanan Administrasi Umum	Kamis, 23 Februari 2023 09:16:50 WIB	081284399949
43	Zulkarnain	Layanan Hukum / Informasi	Kamis, 23 Februari 2023 09:14:34 WIB	085774090902
44	Octondi	Layanan Hukum / Informasi	Kamis, 23 Februari 2023 09:12:17 WIB	08127132284
45	Suci Wulan	Layanan Hukum / Informasi	Jumat, 17 Februari 2023 13:59:53 WIB	087888755351
46	Serlly Waileruny	Layanan Administrasi Umum	Selasa, 7 Februari 2023 11:34:20 WIB	082238362024

47	Yulius	Layanan Perdata	Selasa, 7 Februari 2023	11:17:56 WIB	0813816254
48	Dariyo Saderi	Layanan Perdata	Selasa, 7 Februari 2023	09:45:19 WIB	081314678807
49	Joko Mulyono	Layanan Administrasi Umum	Senin, 6 Februari 2023	15:07:02 WIB	0811854927
50	Rihardhina	Layanan Hukum / Informasi	Senin, 6 Februari 2023	10:17:09 WIB	081322751993
51	Wahyu Wibawa	Layanan Administrasi Umum	Senin, 6 Februari 2023	08:53:33 WIB	087880663662
52	Agus Supriyatna Saputra	Layanan Perdata	Jumat, 3 Februari 2023	14:26:34 WIB	085882379816
53	Joko Mulyono	Layanan Perdata	Senin, 30 Januari 2023	13:56:08 WIB	0811854927
54	Yasher Panjaitan	Layanan e-Court	Senin, 30 Januari 2023	13:54:10 WIB	081808958596
55	Erdick Darryl	Layanan Perdata	Senin, 30 Januari 2023	13:52:28 WIB	087855500861
56	Budi Abdul Azis	Layanan Perdata	Senin, 30 Januari 2023	13:49:52 WIB	081385561805
57	Khaerawati	Layanan Perdata	Senin, 30 Januari 2023	13:41:14 WIB	082128361446
58	Abdul Aziz	Layanan Perdata	Jumat, 27 Januari 2023	13:28:12 WIB	08118600071
59	Erina Djeni	Layanan Pidana	Rabu, 25 Januari 2023	11:19:57 WIB	085893492752
60	David	Layanan Perdata	Rabu, 25 Januari 2023	11:17:29 WIB	081381904404
61	M. Hari Saputra, SH	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 25 Januari 2023	11:15:17 WIB	082169792092
62	Erdick Darryl	Layanan Pidana	Rabu, 18 Januari 2023	13:24:20 WIB	087855500861
63	Ajie Hermadi Buhron	Layanan Tipikor	Rabu, 18 Januari 2023	11:20:15 WIB	08111842752
64	R. Heru Sugiarto,sh	Layanan Perdata	Rabu, 18 Januari 2023	08:41:45 WIB	081911994611
65	Eddy Suryanta Ginting	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 18 Januari 2023	08:39:12 WIB	082113010278
66	NATAS	Layanan Perdata	Selasa, 17 Januari 2023	08:40:31 WIB	081341696455
67	Nalowenda	Layanan Perdata	Selasa, 17 Januari 2023	08:36:02 WIB	081387372098
68	David	Layanan Perdata	Jumat, 13 Januari 2023	11:03:04 WIB	081381904404
69	Juniar	Layanan Perdata	Kamis, 12 Januari 2023	15:30:04 WIB	081316832800
70	Mardianto	Layanan Perdata	Kamis, 12 Januari 2023	15:26:12 WIB	085782296321
71	Alkadri	Layanan Perdata	Kamis, 12 Januari 2023	09:07:43 WIB	081296197883
72	Hans	Layanan Perdata	Rabu, 11 Januari 2023	13:46:10 WIB	0812345678
73	Erbick	Layanan Perdata	Selasa, 10 Januari 2023	11:54:11 WIB	087855500861

74	Maria	Layanan e-Court	Senin, 9 Januari 2023 10:25:15 WIB	082248673644
75	Erik	Layanan Perdata	Kamis, 5 Januari 2023 10:56:46 WIB	087855500861
76	Mario Bistok Manurung	Layanan Perdata	Rabu, 4 Januari 2023 15:14:05 WIB	081315616262
77	Usman Sani	Layanan Perdata	Rabu, 4 Januari 2023 14:27:07 WIB	123457888
78	Laela Ferlyati	Layanan Administrasi Umum	Rabu, 4 Januari 2023 14:22:14 WIB	23456788
79	Riri	Layanan Perdata	Rabu, 4 Januari 2023 14:09:38 WIB	081315378986
80	Ida	Layanan Perdata	Rabu, 4 Januari 2023 14:07:54 WIB	085216582684
81	Ajie Hermadi Buhron	Layanan Pidana	Rabu, 4 Januari 2023 14:05:54 WIB	08111842752
82	Ali Wafa	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 4 Januari 2023 14:03:36 WIB	01234567
83	Fadhly Abdurrahman	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 4 Januari 2023 13:59:20 WIB	085210486260
84	Alreza Pahlevi	Layanan Perdata	Selasa, 3 Januari 2023 14:53:29 WIB	081393488829
85	Arry	Layanan Perdata	Selasa, 3 Januari 2023 14:50:47 WIB	082176096777

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,92 atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,894
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,918
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,847
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,918
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,894
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,953
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,941
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,965
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,918
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,965

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2023 pada triwulan I tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,90 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Tranparansi biaya, menjual pengaruh dan informasi tarif/biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN

MENU PENGISIAN LAYANAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK RESPONDEN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI



Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden
Nama serta detail responden

Layanan
Layanan

Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPAK

Kesan & pesan
mohon isi kesan dan pesan Anda

Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan *

Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya? *

Kembali

Selanjutnya



MENU SARAN DAN MASUKAN UNTUK RESPONDEN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA APLIKASI SISUPER

 APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Survey Persepsi Anti Korupsi | SIPAK

Form kuisioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengotorisasi zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden
Nama serta email responden

Layanan
Layanan

Form Kuisioner
Isian form kuisioner SIPAK

Kesan & pesan
Mohon isi kesan dan pesan Anda

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami di sini...

Terima kasih karena telah mengisi form Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta.
Klik kotak dibawah "Saya bukan robot" sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

Saya bukan robot 

Simpan Data

Kembali **Selanjutnya**